

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan tindak pidana yang dikategorikan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga dalam penegakan hukumnya diperlukan penanganan khusus. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus melalui proses yang penting yaitu proses penyidikan. Salah satu aparat hukum yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan adalah Kejaksaan, sehingga proses penyidikan merupakan proses yang penting untuk menemukan siapa tersangka tindak pidana korupsi.

Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis empiris yang memperoleh data melalui penelitian secara langsung lapangan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis guna menjelaskan terkait proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dan kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Kewenangan ini meliputi pengumpulan bukti, pemeriksaan terhadap tersangka, dan pelaksanaan tindakan hukum lain yang berguna dalam proses penyidikan. Namun dalam praktek upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan mempunyai kendala, kendala yang dihadapi Kejaksaan meliputi keterbatasan sumber daya, keterbatasan dana, keterbatasan koordinasi dengan aparat lainnya. Serta intervensi dan tekanan politik yang dapat mempengaruhi independensi Kejaksaan.

Dengan demikian penelitian ini memberikan pemahaman lebih baik mengenai kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi serta kendala yang dihadapi Kejaksaan selama proses penyidikan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi perbaikan yang perlu dalam penyidikan tindak pidana korupsi serta rekomendasi yang dapat membantu dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi, Penyidikan.

ABSTRACT

Corruption in Indonesia is classified as an extraordinary crime, thus requiring special handling in its law enforcement. The crucial process in combating corruption is the investigation process. One of the law enforcement agencies authorized to conduct investigations is the Prosecutor's, making the investigation process vital in identifying corruption suspects.

This legal writing utilizes a juridical-empirical method that obtains data through direct field research with a descriptive-analytical research specification to explain the investigation process of corruption cases by the Prosecutor's and the constraints faced during the investigation of corruption.

The research results indicate that the Prosecutor's has the authority to investigate corruption cases. This authority includes collecting evidence, interrogating suspects, and carrying out other legal actions that are useful in the investigation process. However, in the practical efforts to combat corruption, the Prosecutor's faces several constraints, including limited resources, financial limitations, limited coordination with other law enforcement agencies, as well as interventions and political pressure that can affect the independence of the Prosecutor's.

Thus, this research provides a better understanding of the Prosecutor's authority in investigating corruption cases and the constraints faced during the investigation process. The findings of this research can serve as a basis for identifying necessary improvements in investigating corruption cases and providing recommendations to assist in combating corruption.

Keywords: *Prosecutor's , Corruption, Investigation.*